

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. Lembaran Negara No. 157. Th 2009. Tambahan Lembaran Negara No. 5076.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009. Lembaran Negara No. 160. Th 2009. Tambahan Lembaran Negara No. 5079.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014. Lembaran Negara No. 292 Th 2014. Tambahan Lembaran Negara No. 5601.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No. 1 Tahun 2019. Berita Negara No. 894. Th 2019.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah*. Perma No. 8 Th 2017. Berita Negara No. 1751. Th 2017.

B. Buku

Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azhary, M Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Basah, Sjachran. *Eksisten dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.

Basah, Sjachran. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2020.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 1996.

Budiman, Arief. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberry, 2006.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Penulis, Tim. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Guepedia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Setiawan, Yudhi dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Depok: RajaWali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Huhkum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soerjono, *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/OOD dan Masalah Ganti Rugi, dalam MA, Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta, 1993.

Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sutiyoso, Bambang. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Penerbit Tintas Mas, 1986.

Wulan, Retno. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

C. Lain-lain

Disampaikan Gasas Bahar Putra pada Presentasi Ujian Paper Magang III Pendidikan Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara di PTUN Makassar pada Tanggal 6 Desember 2019.

M. Hadjon, Philipus. *Pemerintah Menurut Hukum*, Pidato Dies Natalis dan Wisuda Sarjana S1 dan program DIII Universitas Katolik Widya Karya, Malang, tanggal 27 Juni 1992.

Tim Penulis PTUN Yogyakarta. “E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia”, tersedia di: <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>, diakses Tanggal 08 Januari 2021.

Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung RI, *Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*, Jakarta: 2019.

Tim Penyusun Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung RI, *Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*, Jakarta: 2019.

Tim Penulis PTUN Makassar, *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: Guepedia, 2020.

Tim Penyusun Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung RI, *Panduan e-Court bagi pengguna Insidentil Non Advokat*, Jakarta: 2019.

Tim Penyusun Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung RI, *Panduan e-Court bagi pengguna Terdaftar Advokat*, Jakarta: 2019.

Wawancara dengan Bagus Nurhadi, selaku Bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Peradilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, pada Tanggal 16 Februari 2021.